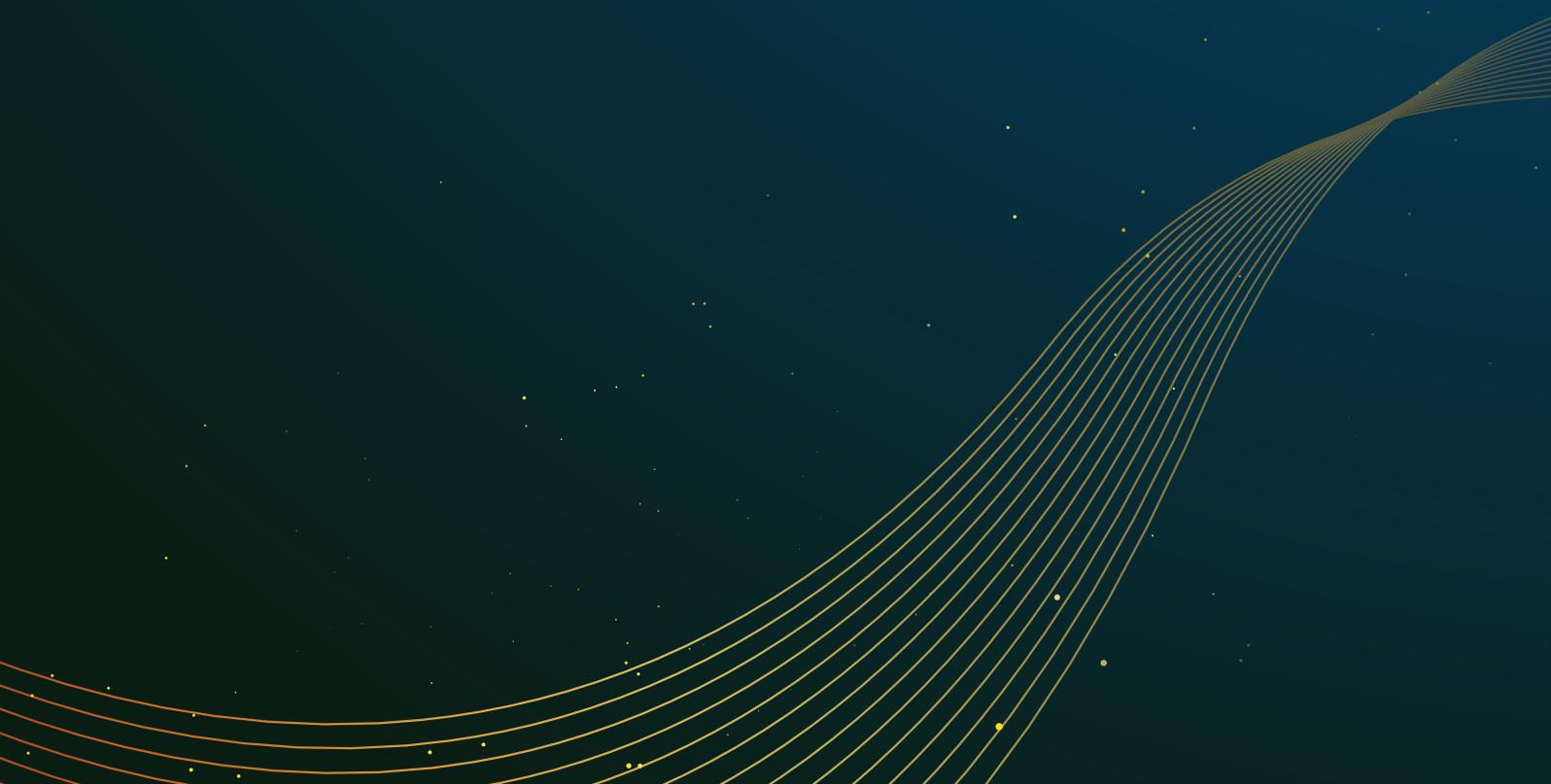
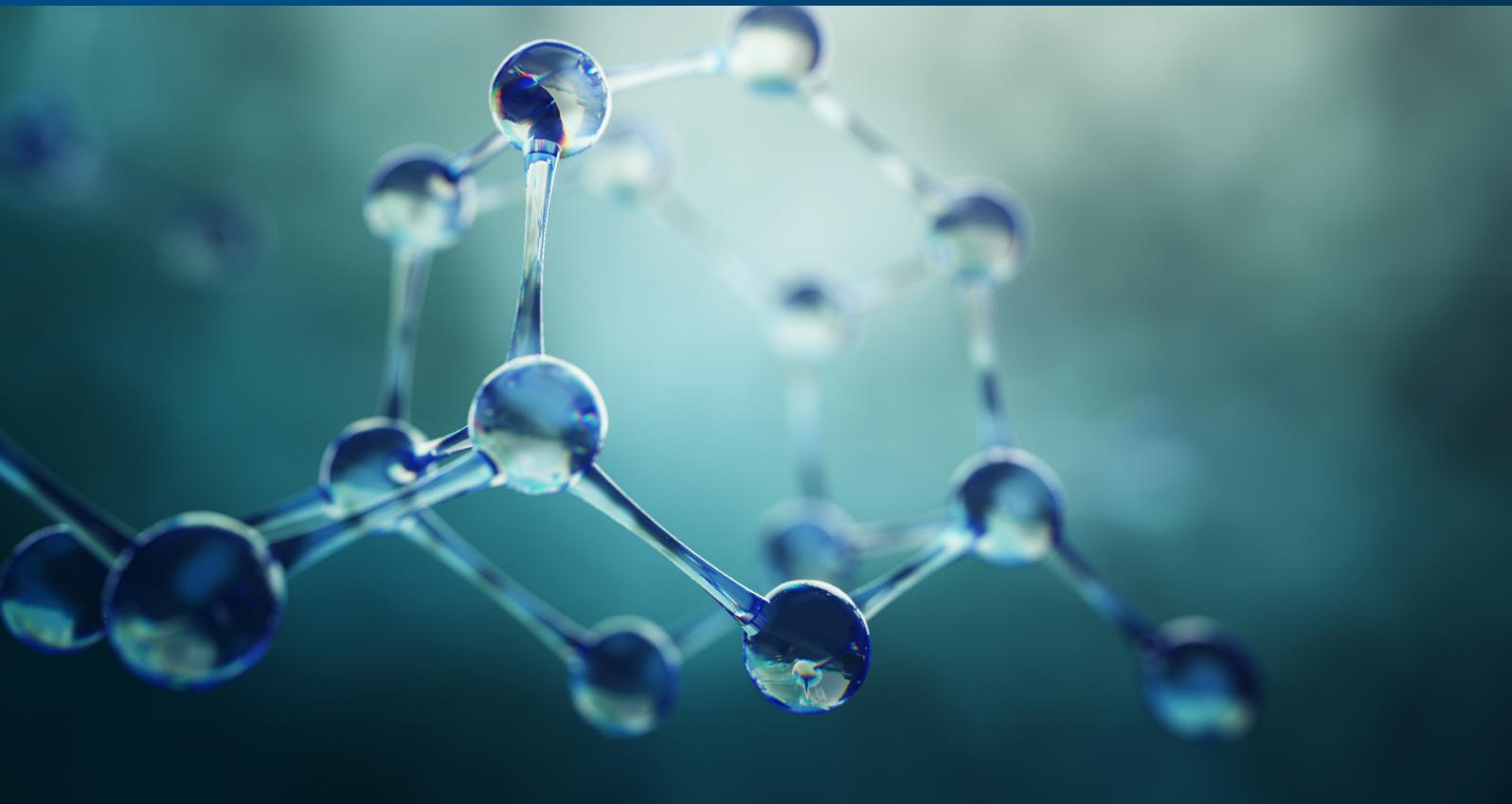


TINJAUAN UMUM

BANGKIT DAN OPTIMIS: SINERGI DAN INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI





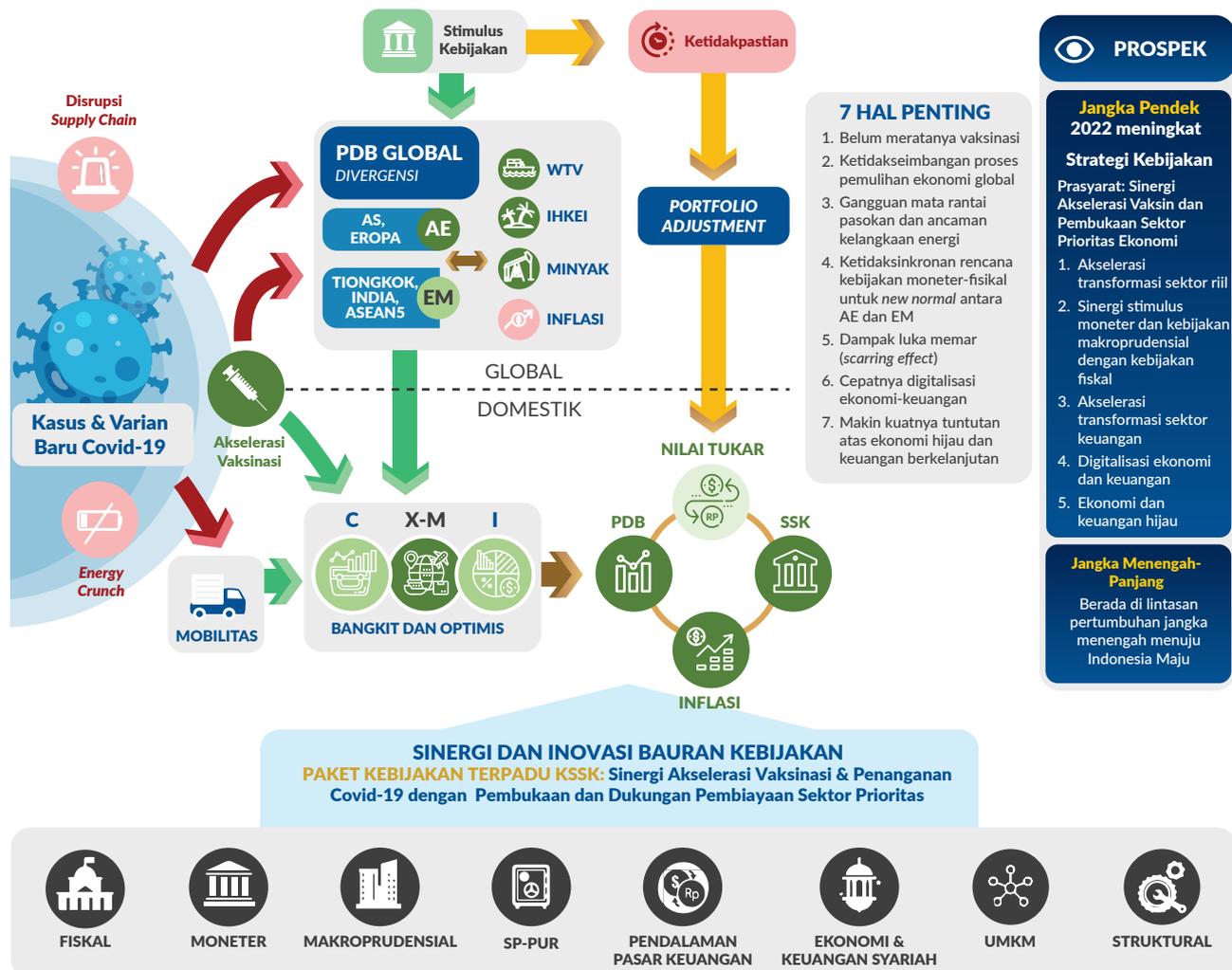
Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Proses pemulihan ekonomi nasional juga terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga, meski sempat tertahan pada triwulan III 2021 seiring dengan merebaknya varian Delta. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022, didukung oleh satu kondisi prasyarat, yaitu sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, serta 5 (lima) respons kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan. Sejalan dengan hal tersebut, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan bersinergi dan menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan dan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Penguatan sinergi dan inovasi tersebut didukung oleh percepatan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, serta transformasi bauran kebijakan Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya menuju Indonesia Maju.

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia 2021 diprakirakan meningkat dengan pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs), khususnya AS, yang kuat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan yang sangat besar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), kecuali Tiongkok, secara umum melanjutkan perbaikan, namun tidak secepat proses pemulihan di AEs. Ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Lebih lanjut, pandemi

menimbulkan 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi agar proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga (Diagram 1).

Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2021 masih terpengaruh oleh berlanjutnya pandemi Covid-19. Merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kinerja ekonomi diprakirakan meningkat pada triwulan IV 2021 didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor

Diagram 1. Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi



Sumber: Bank Indonesia

yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan dalam kisaran 3,2-4,0%. Sementara itu, stabilitas eksternal terjaga tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tercatat rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat. Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, dengan stabilitas eksternal yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik.

Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci dalam mendorong proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sinergi akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan Covid-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level, dengan pembukaan sektor prioritas menjadi *game changer* tidak hanya dalam pengendalian penyebaran varian Delta, namun juga dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan yang semakin kuat antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta inovasi, baik dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional termasuk koordinasi fiskal-moneter, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi-keuangan nasional, juga menjadi faktor kunci berlanjutnya perbaikan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif dengan stimulus fiskal yang cukup besar untuk penanganan dampak Covid-19. Bank Indonesia mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas. Bank Indonesia melanjutkan stimulus moneter dengan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Koordinasi fiskal dan moneter semakin diperkuat melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pendanaan APBN, termasuk untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan makroprudensial akomodatif

dilanjutkan untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan untuk mendukung pembentukan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang efisien dan inklusif. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022.

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi yang dilandasi oleh kuatnya semangat untuk bangkit dan optimis yang lebih tinggi. Dalam hal ini, prospek pemulihan ekonomi nasional akan didukung oleh satu kondisi prasyarat (*necessary condition*), yaitu sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, serta 5 (lima) respons kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (*sufficient conditions*) untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau. Penguatan sinergi dan inovasi tersebut akan membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional 2022 dan tahun-tahun berikutnya, serta peningkatan laju pertumbuhan pada jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju 2045.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan bersinergi dan menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan dan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tahun 2022 direncanakan secara sangat hati-hati dan terukur agar tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs, arah kebijakan moneter pada 2022 akan lebih

diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), baik dalam aspek pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Arah kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kembali berada di lintasan jangka menengah menuju Indonesia Maju.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju. Prospek ini didukung oleh pemulihan perekonomian global yang berlanjut serta peningkatan perekonomian domestik yang juga didorong oleh kenaikan investasi dan produktivitas seiring dengan implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Transformasi bauran kebijakan Bank Indonesia juga akan memperkuat upaya mewujudkan Indonesia Maju, di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompleks. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0-5,8% pada 2026. Inflasi diprakirakan tetap terjaga pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Defisit transaksi berjalan diprakirakan juga tetap terkendali pada level yang sehat dalam kisaran 1,2-2,0% dari PDB, sehingga

menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diprakirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Percepatan transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju didukung oleh penguatan kebijakan reformasi struktural yang disertai dengan transformasi kebijakan Bank Indonesia dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Rangkaian kebijakan reformasi struktural penting untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas serta output potensial dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, dengan stabilitas yang terjaga. Transformasi dan inovasi bauran kebijakan utama Bank Indonesia (kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah) serta kebijakan pendukung sangat diperlukan untuk merespons dinamika perekonomian yang semakin kompleks untuk mewujudkan Indonesia Maju. Termasuk di dalam transformasi tersebut langkah koordinasi kebijakan internasional yang semakin erat, antara lain Presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022 dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Sementara itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Dalam kaitan ini serta memasuki era peradaban baru digitalisasi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia bergerak cepat secara menyeluruh untuk melakukan akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.



Kinerja dan Prospek Ekonomi Global: Pemulihan Belum Berimbang, Ketidakpastian Pasar Keuangan Berlanjut

Penyebaran Covid-19 kembali meningkat didorong merebaknya varian Delta. Kasus harian Covid-19 sempat menunjukkan penurunan pada awal tahun 2021, di tengah munculnya varian Alpha pada akhir 2020. Akselerasi vaksinasi di negara maju pada triwulan I 2021 berdampak positif pada penurunan penyebaran Covid-19, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Penurunan Covid-19 di awal tahun hanya berlangsung sementara seiring dengan merebaknya varian Delta di India pada April 2021 dan dengan cepat menyebar ke Asia dan berbagai belahan dunia, mengancam kesehatan dan kemanusiaan. Varian Delta sangat cepat menular dan lebih ganas dampaknya terhadap kesehatan dan kematian manusia dibandingkan dengan varian Alpha maupun varian lainnya. Penyebaran di Asia mencapai puncaknya pada awal Mei, sedikit menurun pada Juni tetapi meningkat kembali pada Agustus 2021. Penduduk di EMDEs Asia yang memiliki tingkat vaksinasi rendah menjadi sasaran penyebaran varian Delta, antara lain di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan banyak negara lain. Di AS dan di Eropa, penyebaran varian Delta mencapai puncaknya pada Agustus 2021 tetapi tetap pada level yang tinggi hingga akhir 2021.

Perbaikan ekonomi global tertahan seiring dengan peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta.

Kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran varian Delta lebih lanjut tidak terelakkan berdampak pada tertahannya aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin pada berbagai indikator pada saat mulai merebaknya varian Delta pada triwulan II yang menunjukkan melandainya indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, indeks keyakinan bisnis, serta *Purchasing Managers' Index* (PMI). Besaran dampak kepada individu negara cukup bervariasi tergantung pada tingkat vaksinasi serta persepsi konsumen atas kekhawatiran gelombang lanjutan Covid-19. Dalam perkembangannya, seiring dengan menurunnya kasus varian Delta dan meningkatnya kembali mobilitas manusia, aktivitas ekonomi kemudian berangsur-angsur membaik sejak triwulan III 2021.

Secara keseluruhan tahun 2021, perbaikan ekonomi global terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pemulihan ekonomi di AEs, khususnya AS berjalan lebih cepat, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang sangat besar. Sementara di sisi lain, sebagian besar EMDEs, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Disamping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi di sebagian besar EMDEs. Secara keseluruhan, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022, setelah kontraksi 3,1% pada 2020. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan tapering the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Selain itu, kenaikan penyebaran varian Omicron yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian, perlu terus dicermati dan diwaspadai.

Pandemi menimbulkan setidaknya tujuh hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga. Meski demikian, pandemi menimbulkan setidaknya tujuh hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik. *Pertama*, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal. *Kedua*, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat di EMDEs. *Ketiga*, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan barang dan jasa global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. *Keempat*, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AE dan EMs,



serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. *Kelima*, dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi dunia usaha dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. *Keenam*, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antarnegara. *Ketujuh*, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs.

Sejumlah langkah koordinasi kebijakan internasional ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global dan mengatasi berbagai

permasalahan yang muncul. Sejumlah agenda penting mengemuka di forum-forum G20, IMF, FSB, BIS, maupun lainnya, terutama mengenai perluasan pasokan dan distribusi vaksin dari AEs ke EMDEs, penahapan dan kejelasan komunikasi dalam *exit policy*, langkah-langkah bersama mengatasi gangguan dalam mata rantai pasokan global, kelangkaan energi, dan *scarring effect*, serta kerja sama internasional dalam mengakselerasi digitalisasi dan ekonomi-keuangan hijau. Selaras dengan hal tersebut, agenda Keketuaan Indonesia pada G20 pada tahun 2022 akan terus mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berimbang, dengan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional: Proses Pemulihan Terus Berlangsung, Stabilitas Terjaga

Perbaikan ekonomi domestik berlanjut pada semester I dengan stabilitas yang terjaga seiring dengan penurunan penyebaran Covid-19. Ekonomi domestik terus membaik pada triwulan II 2021 dengan tercatat tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (yoy), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (yoy)-(Tabel 1).

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, di tengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, stabilitas

eksternal tetap terjaga ditopang NPI yang mencatat surplus 3,6 miliar dolar AS pada semester I 2021. Kinerja positif tersebut didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah sebesar 0,38% dan 0,68% dari PDB dan surplus transaksi modal finansial sebesar 5,7 dan 1,6 miliar dolar AS pada triwulan I dan II 2021. Nilai tukar Rupiah pada semester I 2021 relatif terkendali ditopang oleh langkah-langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia serta berlanjutnya aliran modal asing ke pasar uang domestik. Stabilitas internal juga tetap baik tercermin dari inflasi yang rendah, yakni sebesar 1,33% (yoy) pada Juni 2021. Di sistem keuangan, stabilitas tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan.

Penyebaran varian Delta menahan perbaikan ekonomi pada triwulan III 2021. Penyebaran Covid-19 varian Delta di Indonesia meningkat tajam di Indonesia hingga mencapai rerata 50.000 kasus per hari pada minggu ketiga Juli 2021 dengan *bed occupancy rate* mencapai 63,31% pada Juli 2021. Kebijakan pembatasan mobilitas khususnya di wilayah Jawa dan Bali ditempuh Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran lebih lanjut varian Delta. Perkembangan tersebut tidak terelakkan berdampak pada penurunan mobilitas dan aktivitas ekonomi tercermin pada berbagai indikator seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan PMI Manufaktur. Kinerja pertumbuhan ekonomi melambat menjadi

Tabel 1. Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Pemulihan Ekonomi

Komponen	2019	2020	2021			
			I	II	III	IV
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)	5,02	-2,07	-0,71	7,07	3,51	
Konsumsi Rumah Tangga (Persen, yoy)	5,04	-2,63	-2,21	5,96	1,03	
Konsumsi Pemerintah (Persen, yoy)	3,26	1,94	2,58	8,03	0,66	
PMTB (Persen, yoy)	4,45	-4,95	-0,23	7,54	3,74	
PMTB Bangunan (Persen, yoy)	5,37	-3,78	-0,74	4,36	3,36	
PMTB Non Bangunan (Persen, yoy)	1,83	-8,38	1,39	18,58	4,89	
Ekspor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	-0,86	-7,70	7,09	31,98	29,16	
Impor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	-7,39	-14,71	5,38	31,72	30,11	
Inflasi IHK (Persen, yoy)	2,58	1,68	1,37	1,33	1,60	1,87
Inflasi Inti (Persen, yoy)	3,00	1,60	1,21	1,49	1,30	1,56
Inflasi <i>Volatile Food</i> (Persen, yoy)	2,99	3,62	2,49	1,60	3,51	3,20
Inflasi <i>Administered Prices</i> (Persen, yoy)	0,72	0,25	0,88	0,49	0,99	1,79
Neraca Pembayaran Indonesia						
Defisit Transaksi Berjalan (Persen PDB)	-2,71	-0,42	-0,38	-0,68	1,49	
Transaksi Modal dan Finansial (miliar Dolar AS)	36,60	7,89	5,70	1,64	6,10	
<i>Overall Balance</i> (miliar Dolar AS)	4,68	2,60	4,06	-0,45	10,69	
Cadangan Devisa (miliar Dolar AS)	129,2	135,9	137,1	137,1	146,9	144,9
Nilai Tukar (rata-rata; Rp per Dolar AS)	14.139	14.525	14.157	14.399	14.373	14.259
IHSG (rata-rata; Indeks)	6298,9	5240,9	6226,3	5981,8	6092,8	6580,6
<i>Yield SUN 10 Tahun</i> (rata-rata; Persen)	7,53	6,98	6,41	6,48	6,24	6,18
Perbankan						
Kredit Total (Persen, yoy)	6,08	-2,41	-3,75	0,59	2,21	5,24
CAR (akhir periode, persen)	23,31	23,81	24,05	24,30	25,18	25,59*
NPL (akhir periode, persen)	2,53	3,06	3,17	3,24	3,22	3,00
APBN						
Pajak (Persen PDB)	9,76	8,33	1,73**	2,32**	2,10**	3,06**
Keseimbangan Primer (Persen PDB)	-0,46	-4,11	-0,39**	-0,3**	-0,49**	-1,44**
Defisit APBN (Persen PDB)	-2,20	-6,14	-0,86**	-0,83**	-1,00**	-1,98**

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan BEI
Keterangan: *Posisi November 2021; ** Angka sementara

3,51% (yoy) pada triwulan III 2021 dari 7,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi melambat dari 5,96% (yoy) dan 7,54% (yoy) menjadi 1,03% (yoy) dan 3,74% (yoy). Dukungan pertumbuhan dari kinerja ekspor yang tetap tinggi, yaitu 29,16% pada triwulan III 2021 sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, tidak mampu mengompensasi penurunan pertumbuhan permintaan domestik. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan dan Penggalian tetap tumbuh positif, kendati beberapa LU terkait mobilitas masyarakat yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan berkontraksi.

Stabilitas eksternal tetap terjaga di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap kuat didukung oleh perbaikan kinerja NPI yang mencatat surplus 10,7 miliar dolar AS pada triwulan III 2021, setelah mengalami defisit 0,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus 4,5 miliar dolar AS (1,49% dari PDB), berbalik dari triwulan sebelumnya yang tercatat defisit 2,0 miliar dolar AS (0,68% dari PDB). Hal ini ditopang oleh kinerja ekspor yang tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan global dan harga komoditas dunia. Selain itu, transaksi modal dan finansial mencatat peningkatan surplus dari 1,6 miliar dolar AS pada triwulan II 2021 menjadi 6,1 miliar dolar AS, seiring dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2021 tercatat sebesar 146,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, nilai tukar Rupiah pada triwulan III 2021 menguat 1,31% secara *point to point* dan 0,18% secara rerata dibandingkan dengan level Juni 2021.

Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) triwulan III 2021 tercatat 1,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan II 2021 sebesar 1,33% (yoy). Inflasi inti tetap rendah sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan sedikit tertahan pada triwulan III 2021

dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi kenaikan kasus Covid-19 varian Delta, terjaganya stabilitas nilai tukar, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Inflasi kelompok *volatile food* meningkat disebabkan oleh kenaikan harga komoditas hortikultura dan minyak goreng sejalan dengan kenaikan harga CPO global di tengah pasokan barang yang memadai. Inflasi kelompok *administered prices* meningkat sejalan masih berlanjutnya dampak kenaikan cukai tembakau. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya.

Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat.

Hal ini terindikasi dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang terjaga dalam zona normal dan Indeks Kerentanan Sistem Keuangan (IKSK) yang membaik. Ketahanan sistem keuangan juga tetap kuat sebagaimana ditunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan yang tetap tinggi sebesar 25,18%. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*) tetap terjaga, yakni 3,22% (bruto) dan 1,04% (neto) dengan likuiditas perbankan yang sangat longgar yakni rasio AL/DPK yang tinggi sebesar 33,53% pada September 2021. Kondisi ini kemudian dapat menyerap risiko yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan dan mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Meski sempat tertahan pada Juli 2021 seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas, pertumbuhan kredit melanjutkan peningkatan hingga mencapai 2,21% (yoy) pada September 2021. Perkembangan tersebut didorong baik perbaikan permintaan kredit, terutama dari dunia usaha dan konsumsi, maupun peningkatan penawaran kredit seiring dengan menurunnya persepsi risiko, longgarnya likuiditas, dan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit baru. Kinerja positif pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh kelompok penggunaan kredit, terutama Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja. Kenaikan kredit yang lebih tinggi tercatat pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu sebesar 8,67% pada September 2021.

Aktivitas pembayaran menurun seiring dengan tertahannya perbaikan ekonomi pada triwulan III 2021. Nilai transaksi pembayaran menggunakan nontunai baik ATM-Debit dan Kartu Kredit mengalami perlambatan sejalan implementasi kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi kenaikan kasus Covid-19 varian Delta. Nilai transaksi menggunakan ATM-Debit melambat dari 29,2% (yoy) pada triwulan II 2021 menjadi 8,2% (yoy) pada triwulan III 2021, sementara nilai transaksi menggunakan Kartu Kredit juga melambat dari 23,7% (yoy) pada triwulan II 2021 menjadi 6,4% (yoy) pada triwulan III 2021. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik (UE) dan *digital banking* tumbuh meningkat masing-masing sebesar 52,5% (yoy) dan 60,7% (yoy) pada triwulan III 2021. Transaksi digital tumbuh pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi *e-commerce* pada semester I 2021 tumbuh positif, meskipun melambat pada triwulan III menjadi 58,19% (yoy) dari 75,36% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2021, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut. Kinerja perekonomian diperkirakan meningkat didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan mulai membaik pada triwulan IV 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan keyakinan konsumen. Kinerja investasi juga meningkat, terutama investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya kegiatan konstruksi Pemerintah dan swasta. Sementara itu, kinerja ekspor beberapa komoditas, seperti batu bara, CPO, serta besi dan baja, tetap kuat seiring permintaan global yang terus membaik. Seiring dengan pemulihan permintaan domestik dan tetap kuatnya ekspor, impor juga tumbuh meningkat. Berdasarkan lapangan usaha (LU), kinerja LU yang terkait dengan konsumsi dan investasi meningkat, termasuk LU Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman, serta Konstruksi. Secara spasial, proses pemulihan ekonomi di wilayah Jawa, Sumatera,

Kalimantan, dan Sulampua didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2021 tercermin dari kenaikan indikator hingga Desember 2021 seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI Manufaktur.

Stabilitas makroekonomi terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Stabilitas eksternal tetap terjaga dengan NPI pada triwulan IV diperkirakan tetap baik, ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus. Secara keseluruhan 2021, NPI diperkirakan mencatat kenaikan surplus dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya, didukung oleh kinerja transaksi berjalan yang diperkirakan mencatat surplus sekitar 0,2% dari PDB, serta surplus transaksi finansial dan modal yang meningkat. Cadangan devisa meningkat menjadi 144,9 miliar dolar AS pada akhir 2021, setara pembiayaan 7,8 bulan impor dan ULN Pemerintah. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah pada triwulan IV 2021 tercatat menguat 0,80% secara rerata dan 0,42% secara *point to point* dibandingkan dengan level pada akhir triwulan III 2021. Penguatan nilai tukar Rupiah didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, terjaganya pasokan valas domestik, dan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, secara *point-to-point* (ptp), Rupiah terdepresiasi 1,42% dan ditutup di level Rp14.253 per dolar AS pada akhir 2021. Perkembangan tersebut tercatat lebih baik dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Inflasi 2021 tercatat rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi 2020 sebesar 1,68% (yoy), meskipun berada di bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,56% (yoy) sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang

terjaga, serta pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Inflasi *volatile food* terkendali sebesar 3,20% (yoy), didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi kelompok *administered prices* meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79% (yoy), antara lain sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan cukai tembakau.

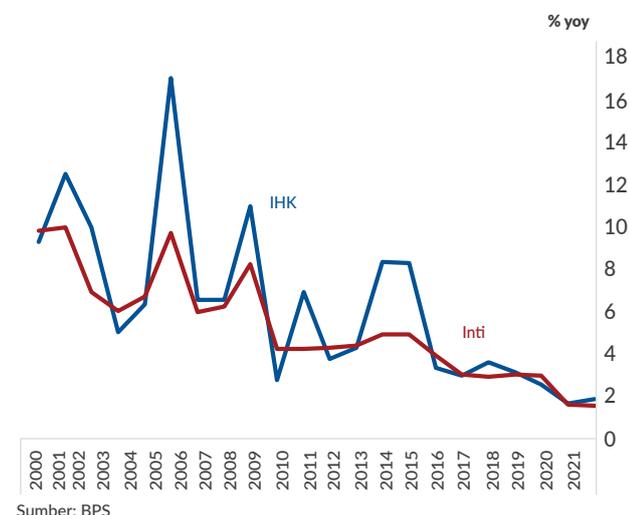
Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang melanjutkan peningkatan. ISSK tetap rendah dan terjaga di zona normal-stabil sepanjang tahun 2021. Ketahanan permodalan bank tetap tinggi tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) sebesar 25,59% pada November 2021. Rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah terjaga pada posisi 3,19% (*gross*) dan 0,98% (*nett*) pada November 2021, seiring ekonomi yang terus mengalami perbaikan dan didukung perpanjangan implementasi kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK. Likuiditas perbankan sangat longgar, tercermin dari rasio AL/DPK yang tinggi sebesar 35,12% pada Desember 2021, sehingga mendukung kinerja positif fungsi intermediasi perbankan. Pertumbuhan kredit terus melanjutkan peningkatan positif sepanjang tahun 2021, hingga tumbuh 5,24% pada Desember 2021. seiring dengan perbaikan kondisi permintaan dan penawaran. Pertumbuhan kredit UMKM meningkat pada 2021, seiring dengan berlanjutnya perbaikan di sektor riil dan dunia usaha, khususnya UMKM. Kredit Konsumsi dan Kredit

Modal Kerja terus menunjukkan kinerja positif, tumbuh 4,67% dan 6,32%. Di sektor konsumsi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terus mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,13% (yoy) pada Desember 2021 sejalan dengan kebijakan terpadu KSSK untuk mendorong sektor properti.

Berlanjutnya perbaikan ekonomi mendorong peningkatan kembali transaksi pembayaran. Nilai transaksi pembayaran menggunakan nontunai Kartu Kredit mengalami peningkatan pada triwulan IV 2021 menjadi 21,5% (yoy) dari 6,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Nilai transaksi menggunakan ATM-Debit tetap tumbuh positif sebesar 7,1% (yoy) pada triwulan IV 2021 dan sebesar 11,0% (yoy) untuk secara keseluruhan 2021. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik (UE) dan *digital banking* tetap tumbuh tinggi masing-masing sebesar 58,7% (yoy) dan 42,9% (yoy), dan tumbuh masing-masing sebesar 49,06% (yoy) dan 45,64% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2021. Hal ini diperkuat dengan perluasan ekosistem QRIS yang telah melampaui target 12 juta *merchant* pada tahun 2021, terutama didukung oleh peningkatan pada UMI (Usaha Mikro) dan UKE (Usaha Kecil) yang masing-masing mencapai lebih dari 7 juta dan 3 juta *merchant*. Pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga, asosiasi/organisasi dan industri, serta seluruh elemen masyarakat. Nilai transaksi *e-commerce* tetap tumbuh kuat sebesar 28,28% (yoy) pada triwulan IV 2021, dan diproyeksikan tumbuh 50,74% (yoy) secara keseluruhan 2021. Kinerja positif tersebut didukung perluasan ekosistem *e-commerce*, perubahan perilaku masyarakat berbelanja *online*, serta berbagai inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan berbelanja.

Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Akselerasi perekonomian nasional di 2022 didukung oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penyebaran Covid-19 yang lebih terkendali dan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia

Grafik 1. Inflasi IHK dan Inflasi Inti



memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai. Konsumsi swasta diperkirakan akan kembali pulih dan mencapai pertumbuhan sekitar 5% pada semester II 2022, ditopang oleh terkendalnya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal, dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global. Investasi diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan permintaan domestik, tetap kuatnya kinerja ekspor, berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang sempat tertunda, dan kenaikan PMA seiring dengan membaiknya iklim investasi di dalam negeri. Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi akan didukung sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Akselerasi pemulihan ekonomi juga dibarengi dengan stabilitas yang tetap terjaga. Stabilitas eksternal pada 2022 diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan berada pada kisaran 1,1-1,9% dari PDB, dengan surplus neraca transaksi modal dan finansial yang meningkat. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga ditopang kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung seiring dengan normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran yaitu $3\pm 1\%$, meskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Dalam hal ini, inflasi tetap terkendali dengan dukungan kapasitas produksi nasional yang mencukupi untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat, di tengah dampak kenaikan harga energi global yang tetap perlu diwaspadai. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan juga tetap baik dengan fungsi intermediasi perbankan yang meningkat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*) perbankan tetap tinggi dan rasio kredit bermasalah (*NPL*) tetap terjaga, termasuk dengan tetap berlakunya pengaturan restrukturisasi kredit dari OJK. Likuiditas perbankan tetap longgar tercermin dari tingginya rasio AL/DPK

di tengah rencana Bank Indonesia akan mengurangi secara bertahap likuiditas (*tapering*) sebagai bagian dari normalisasi stimulus moneter. Intermediasi perbankan akan semakin membaik, dengan pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan mencapai 6,0-8,0% dan 7,0-9,0% pada 2022.

Ekonomi keuangan digital nasional akan terus meningkat pesat pada tahun 2022 didukung oleh akselerasi digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Transaksi *e-commerce* pada 2022 diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai Rp526 triliun, atau tumbuh 31%, didukung perluasan ekosistem *e-commerce*, terus berlanjutnya pergeseran preferensi perilaku masyarakat untuk berbelanja *online*, maupun berbagai inovasi dan promosi oleh para perusahaan dan program-program Pemerintah dan Bank Indonesia. Kenaikan pesat transaksi UE diperkirakan juga terus berlanjut didorong oleh perluasan penggunaan UE pada *e-commerce* dan pada berbagai platform *online* lainnya. Penggunaan UE diperkirakan tetap tumbuh tinggi 17,1% (yoy) hingga mencapai Rp358 triliun pada 2022. Demikian pula, transaksi *digital banking* pada 2022 diproyeksikan akan tetap kuat didukung oleh kenyamanan konsumen bertransaksi secara digital dan berbagai inovasi digital oleh perbankan. Transaksi pembayaran *digital banking* diproyeksikan tumbuh tinggi 24,8% (yoy) hingga mencapai Rp49,7 ribu triliun pada 2022. Berbagai inisiatif Bank Indonesia untuk digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 akan terus diakselerasi untuk menciptakan transaksi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi-keuangan digital nasional.

Berdasarkan pengalaman pada tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia. *Pertama*, sinergi untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor prioritas perlu terus diperkuat untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor ekspor maupun untuk memenuhi kenaikan permintaan domestik termasuk UMKM. *Kedua*, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter the Fed dan

sejumlah bank sentral lain, sinergi untuk penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan untuk mempercepat reformasi struktural di sektor riil, keberlanjutan stimulus fiskal yang didukung sebagian pendanaannya dari Bank Indonesia, serta sinergi KSSK untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha perlu terus dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. *Ketiga*, inovasi perlu diperkuat, baik dalam sinergi

kebijakan ekonomi nasional, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi dan keuangan nasional melalui digitalisasi sistem pembayaran serta program-program pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Inovasi kebijakan dan program juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan hijau, baik untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional maupun untuk menyikapi semakin tingginya tuntutan dari negara-negara maju.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021: Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Menjaga Stabilitas

Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Sinergi kebijakan yang semakin kuat antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan KSSK, serta inovasi, baik dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional termasuk koordinasi fiskal-moneter, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi-keuangan nasional, menjadi faktor kunci berlanjutnya perbaikan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif dengan stimulus fiskal yang cukup besar untuk penanganan dampak Covid-19, termasuk untuk anggaran kesehatan dan perlindungan sosial. Dengan kebijakan fiskal ekspansif tersebut, defisit fiskal pada 2021 diperkirakan sebesar 4,65% dari PDB. Koordinasi erat Bank Indonesia dengan Pemerintah dan KSSK ditempuh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan kepada dunia usaha, antara lain melalui penerbitan paket kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti dan otomotif. Sementara itu, OJK melanjutkan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit dengan penundaan angsuran pokok dan bunga dengan memperpanjang POJK No. 28 Tahun 2021 hingga berlaku sampai Maret 2023. Langkah ini diharapkan dapat berdampak positif pada upaya pengendalian kredit bermasalah, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja permodalan perbankan. Demikian pula, LPS memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada perbankan sehingga mendukung terjaganya

stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat bunga penjaminan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Respons cepat Pemerintah dalam sinergi kebijakan nasional menjaga ekonomi nasional mampu bertahan dari dampak penyebaran Covid-19 varian Delta. Langkah cepat Pemerintah bersama berbagai elemen bangsa dan dukungan masyarakat mampu mengendalikan penyebaran varian Delta yang mencapai puncaknya pada Juli-Agustus 2021. Akselerasi vaksinasi yang ditempuh Pemerintah telah menjadi faktor penting untuk mampu bertahan dari serangan varian Delta. Penguatan penanganan dan pengendalian Covid-19, termasuk PPKM berbagai level secara ketat disertai dengan peningkatan kapasitas kesehatan, juga berkontribusi dalam pengendalian lebih jauh penyebaran varian Delta. Dengan respons cepat tersebut, jumlah kasus baru harian Covid-19 menurun dan terkendali, setelah sempat melonjak tajam hingga mencapai rerata 50.000 kasus per hari pada minggu ketiga Juli 2021. Lebih jauh, sinergi kebijakan nasional dalam akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor prioritas menjadi *game changer* untuk tidak hanya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, namun juga dalam menjaga berlanjutnya perbaikan perekonomian nasional. Sejalan dengan meredanya penyebaran varian Delta, mobilitas dan aktivitas ekonomi kembali meningkat sehingga mendukung proses pemulihan ekonomi.

Koordinasi fiskal dan moneter semakin diperkuat, tidak saja dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pendanaan APBN. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mendukung penuh upaya Pemerintah dan berpartisipasi dalam pendanaan APBN untuk akselerasi vaksinasi maupun penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19. Bank Indonesia terpanggil untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan kemanusiaan akibat virus Covid-19 varian Delta, sebagai tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, dan keamanan rakyat. Partisipasi dilakukan dengan memperkuat peran Bank Indonesia untuk pendanaan APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian SBN secara langsung (*private placement*) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 (KB III). Pembelian SBN tersebut sebesar Rp215 triliun untuk APBN tahun 2021 dan sebesar Rp224 triliun untuk APBN tahun 2022, dengan suku bunga rendah sebesar Bank Indonesia *Reverse Repo Rate* tenor 3 bulan. Partisipasi Bank Indonesia juga berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia melanjutkan komitmen pembelian SBN untuk pembiayaan APBN 2021. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari: (i) pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (KB I) sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember 2022, dan (ii) *private placement* sebesar Rp215 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai KB III. Kebijakan tersebut melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, terdiri dari pembelian SBN melalui mekanisme lelang di pasar perdana (KB I) sebesar Rp75,86 triliun dan pembelian SBN secara langsung sebagai mekanisme pembagian

beban (*burden sharing*) APBN (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020, KB II) sebesar Rp397,56 triliun.

Bank Indonesia berkomitmen untuk mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Dengan mempertimbangkan perekonomian Indonesia pada 2021 yang berada di bawah lintasan optimum siklus bisnis dan siklus keuangan, Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif dengan memanfaatkan ruang pelonggaran yang ada. Di kebijakan moneter, Bank Indonesia melanjutkan stimulus moneter dengan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan untuk memperkuat *stance* kebijakan moneter akomodatif. Kebijakan nilai tukar Rupiah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, bersinergi dengan kebijakan KSSK. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan sesuai BSPI 2025 untuk mendukung pembentukan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang efisien dan inklusif. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan pendukung, seperti kebijakan pendalaman pasar keuangan, ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan UMKM, dan internasional untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Setelah menurunkan suku bunga kebijakan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 5 (lima) kali sejak 2020, Bank Indonesia kembali menurunkan BI7DRR pada Februari 2021 menjadi 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Pada periode selanjutnya hingga akhir 2021, Bank Indonesia tetap mempertahankan BI7DRR sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Injeksi likuiditas (*quantitative*

easing) dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Pada 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp147,83 triliun. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020 kebijakan *quantitative easing* telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari PDB. Selain injeksi likuiditas kepada perbankan, seperti dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun. Pembelian SBN untuk pendanaan APBN ini juga menambah likuiditas di dalam perekonomian sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah.

Kebijakan stabilisasi terus diperkuat untuk menjaga nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan ini ditempuh melalui strategi *triple intervention*, baik di pasar spot, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Kebijakan stabilisasi nilai tukar dimaksud juga didukung dengan cadangan devisa yang memadai sebagai *first line of defense*. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, untuk memperkuat *second-line defense*. Penguatan dan perluasan kerja sama dengan bank sentral di kawasan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen (*Local Currency Settlement*- LCS) perdagangan dan investasi dalam rangka mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dolar AS juga terus dilakukan. Penguatan kerangka LCS telah dilakukan pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada September 2021. Komunikasi intensif kepada para investor, lembaga rating, serta pelaku pasar domestik dan luar negeri juga diperkuat dalam rangka membangun keyakinan, optimisme, dan persepsi positif, serta mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan operasi moneter untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun di pasar valuta asing.

Stance kebijakan makroprudensial tetap akomodatif dan tersinergi dengan kebijakan KSSK untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melakukan pelonggaran LTV untuk kredit properti dan uang muka KKB menjadi 0% berlaku efektif 1 Maret 2021, bersinergi dengan Pemerintah dan OJK yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti dan otomotif. Bank Indonesia juga melakukan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit perbankan sejak Februari 2021 untuk memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) kembali diaktivasi secara bertahap dengan menaikkan batas bawah RIM menjadi 75% pada Mei 2021, 80% pada September 2021, dan 84% pada Januari 2022. Berbagai kebijakan tersebut kami sinergikan dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui besaran *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) yang tetap 0% dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% yang seluruhnya dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga telah menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021. Kebijakan dimaksud efektif sejak 31 Agustus 2021 dengan target pemenuhan RPIM yang ditetapkan secara bertahap sebesar 20% pada Juni 2022 hingga 30% pada Juni 2024.

Bank Indonesia melanjutkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Sebagai implementasi BSPI 2025, pada 2021 digitalisasi sistem pembayaran ditekankan pada 3 (tiga) prioritas dan capaian penting, yaitu reformasi regulasi, infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standardisasi sistem pembayaran. Pada aspek reformasi regulasi, transformasi kebijakan ditempuh untuk konsolidasi industri sistem pembayaran nasional disertai dengan kemudahan dan penyederhanaan prosedur perizinan. Untuk itu, PBI Sistem Pembayaran (SP), yang telah terbit pada akhir tahun 2020, diperkuat dengan penerbitan PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP)

pada 1 Juli 2021. Pada aspek infrastruktur sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia meluncurkan BI-FAST yang bersifat *real time* dan 24/7 sebagai bagian untuk mendorong infrastruktur yang 3I (Integrasi, Interkoneksi, dan Interoperabilitas), aman, dan andal. BI-FAST dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end*, dan mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal (cemumuah). Sementara pada aspek standardisasi sistem pembayaran, perluasan ekosistem terus didorong melalui pengembangan dan perluasan QRIS serta implementasi SNAP. Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah juga terus diperkuat melalui penggunaan QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Berwisata di Indonesia (BWI).

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat untuk memperluas program elektronifikasi pembayaran guna mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Untuk memperkuat elektronifikasi bansos, Bank Indonesia mendorong digitalisasi bansos 4.0 melalui penguatan model bisnis, regulasi, dan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan termasuk melanjutkan peningkatan kualitas data. Penguatan elektronifikasi pembayaran tersebut akan mendukung penyaluran bantuan sosial Pemerintah yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan juga tata kelola yang lebih baik di tengah pandemi. Elektronifikasi transaksi Pemda, termasuk penarikan pajak dan retribusi, serta belanja dan pengeluaran, juga terus berkembang didukung penguatan sinergi program strategis satuan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Di area elektronifikasi transportasi, Bank Indonesia mendorong integrasi sistem dan data pembayaran di sektor transportasi. Bank Indonesia memberikan dukungan penyusunan model bisnis aspek pembayaran untuk moda transportasi terintegrasi serta *multi lane free flow* jalan tol yang akan mulai beroperasi bertahap tahun 2022. Sinergi antarotoritas dan *stakeholder* terkait menyukseskan penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 yang menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan

dan perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Akselerasi pendalaman pasar uang terus dilanjutkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia terus mendorong implementasi *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU)* dengan tiga inisiatif utama, yaitu mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan manajemen risiko. Pada tahun 2021, upaya pendalaman pasar keuangan difokuskan pada percepatan pengembangan transaksi repo dan DNDF, yang didukung oleh penguatan infrastruktur melalui penguatan kerangka pengaturan dan implementasi *Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching*. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia, dan mempercepat pengembangan pasar uang sekaligus menjawab tantangan global berupa G20 OTC *Derivative Market Reform*. Dalam rangka penguatan infrastruktur, Bank Indonesia mempercepat proses pembentukan CCP untuk mengatasi segmentasi dan fragmentasi di pasar uang Indonesia dengan memitigasi risiko kredit peserta transaksi dan mendorong penyelesaian transaksi yang lebih efisien. Lebih lanjut, pengembangan instrumen lain seperti *overnight index swap* untuk pelaksanaan lindung nilai suku bunga, dan penguatan kerangka *Local Currency Settlement (LCS)* terus didorong. Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan OJK melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) terus mengembangkan instrumen keuangan untuk pembiayaan ekonomi.

Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya ditingkatkan untuk mengembangkan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat program pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM digital dan ekspor. Dalam

kaitan ini, program pengembangan UMKM terus ditingkatkan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilanjutkan melalui 3 (tiga) pilar, yakni pemberdayaan ekonomi syariah termasuk penguatan ekosistem *halal value chain*, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset,

asesmen, dan edukasi.¹ Pada setiap pilar tersebut, strategi penguatan terus dilakukan baik dalam aspek penguatan kelembagaan, perluasan implementasi, serta penguatan infrastruktur pendukung termasuk digitalisasi. Sementara itu, kebijakan internasional Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan baik global maupun Indonesia.

Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi yang dilandasi oleh kuatnya semangat untuk bangkit dan optimis yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, sebagai kebijakan prasyarat untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional, sangat diperlukan. Selanjutnya, 5 (lima) respons kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan

kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau. Penguatan sinergi dan inovasi tersebut akan membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional 2022 dan tahun-tahun berikutnya, serta peningkatan laju pertumbuhan pada jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju 2045.

Pertama, respons kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada pemulihan secepatnya sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Pemetaan sektor-sektor prioritas yang mampu berdaya tahan, pendorong pertumbuhan, serta penopang pemulihan ekonomi, telah dilakukan disertai dengan identifikasi kendala yang dihadapi dalam pemulihan baik kendala

¹ Elaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga dapat dilihat pada Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2021 pada Bab 3 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Bab 4 Arah Kebijakan 2022.

di sektor riil maupun dari sisi pembiayaan. Lebih lanjut, sinergi dan inovasi kebijakan sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, baik pemecahan berbagai kendala (*debottlenecking*) dari sisi sektor riil, pemberian insentif kebijakan fiskal, maupun dukungan kebijakan makroprudensial dan sektor keuangan. *Kedua*, respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan sinergi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus moneter dan makroprudensial dari Bank Indonesia untuk mendorong permintaan khususnya dalam jangka pendek. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menstimulasi perekonomian dan target pembangunan dengan postur APBN 2022 yang diperkirakan mengalami defisit Rp868 triliun atau 4,85% PDB. Bank Indonesia melanjutkan komitmen dalam pendanaan APBN 2021 dan 2022 serta melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk tetap mendorong fungsi intermediasi. Dengan sinergi tersebut, Pemerintah dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN tahun 2021 dan 2022 untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, respons kebijakan untuk akselerasi menyangkut peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan diperlukan dengan mengatasi permasalahan baik dari sisi penawaran maupun permintaan kredit. Selain kredit perbankan, pembiayaan dari pasar modal juga semakin diperlukan, baik melalui penerbitan saham maupun obligasi korporasi. Selain itu, transformasi pasar keuangan sangat diperlukan untuk semakin

memperluas alternatif pembiayaan kepada dunia usaha. *Keempat*, respons kebijakan untuk akselerasi digitalisasi serta inklusi ekonomi dan keuangan nasional. Bank Indonesia secara konsisten mendukung Gernas BBI dan BWI untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan nasional. Komitmen kuat dari Bank Indonesia untuk inklusi ekonomi dan keuangan juga dilakukan melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 untuk integrasi dan penguatan Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) nasional yang efisien dan inklusif. *Kelima*, respons kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan hijau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi hijau, yakni ekonomi rendah karbon, perlu dilakukan secara gradual dan moderat, untuk optimalisasi respons kebijakan akibat perubahan iklim. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan keuangan hijau guna mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkelanjutan, melalui koordinasi erat dengan otoritas terkait serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional. Selain itu, Bank Indonesia mendukung transformasi menuju sistem keuangan hijau, sehingga dapat mendorong kontribusi sektor keuangan domestik dalam penurunan emisi karbon. Kelima respons kebijakan dalam sinergi dan inovasi kebijakan untuk pemulihan ekonomi tersebut selaras Presidensi G20 Indonesia pada 2022, dengan tema yakni “*Recover Together, Recover Stronger*”. Presidensi G20 Indonesia fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022: Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Menjaga Stabilitas

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Arah bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut disusun dengan terus mencermati prospek ekonomi global dan enam permasalahan yang menjadi agenda koordinasi kebijakan internasional dalam Ketekuaan Indonesia di G20 pada tahun 2022. Terkait hal ini, 5 (lima) instrumen kebijakan dalam bauran kebijakan, yaitu: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau memerlukan perhitungan matang, perencanaan seksama, dan komunikasi yang jelas. Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs, arah kebijakan moneter pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), baik dalam aspek pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Arah kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kembali berada di lintasan jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Arah dan penahanan kebijakan moneter akan dilakukan secara *pre-emptive*, *ahead the curve*, dan *front-loading* untuk tetap menjaga stabilitas dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter dan konsolidasi kebijakan fiskal global dan kenaikan Fed Funds Rate (FFR), dengan tetap mendukung

pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan suku bunga rendah akan tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. Fokus kebijakan suku bunga lebih diarahkan pada penguatan efektivitas transmisinya pada penurunan suku bunga kredit perbankan melalui kebijakan transparansi suku bunga serta pendalaman pasar uang untuk menurunkan perbedaan imbal hasil SBN jangka menengah-panjang dengan suku bunga PUAB yang masih tinggi. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan dengan penurunan secara bertahap kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan. Normalisasi likuiditas akan dilakukan secara terukur dan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit dan melakukan pembelian SBN, sehingga akan tetap mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan serta berlangsungnya proses pemulihan ekonomi nasional. Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) yang berlaku mulai 1 Maret 2022, 1 Juni 2022, dan 1 September 2022 hingga menjadi 6,5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 5,0% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, respons kebijakan terhadap dampak normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs lainnya ditekankan pada kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas eksternal dengan tetap memelihara stabilitas moneter dan sistem keuangan serta proses pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal akan terus diperkuat agar dapat terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga terus diperkuat dalam pengendalian inflasi dan mendorong sektor-sektor prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial longgar dilakukan

dengan memberikan insentif bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dan/atau bank-bank yang memenuhi target RPIM berupa pengurangan kewajiban GWM harian sampai dengan sebesar 100 bps, mulai berlaku 1 Maret 2022. Kebijakan makroprudensial longgar juga dilakukan melalui penetapan kembali Rasio CCyB yang rendah, fleksibilitas pemenuhan rasio PLM melalui repo kepada Bank Indonesia, serta rasio FLTV/LTV KPR/KPA sebesar 100% dan uang muka KKB sebesar 0% bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF rendah yang akan tetap berlaku sampai dengan akhir Desember tahun 2022. Kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan pembiayaan perbankan seperti RIM dan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan dan diperkuat dengan pengawasan makroprudensial kepada perbankan. Selain itu, kebijakan makroprudensial longgar juga akan diperluas untuk mendorong kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas sebagai bagian koordinasi kebijakan KSSK dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif khususnya UMKM, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) akan terus ditingkatkan efektivitas implementasinya baik dalam bentuk pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank, upaya klusterisasi dan korporatisasi UMKM bersinergi dengan Pemerintah, mendorong kerja sama bank dengan lembaga mitra penyalur UMKM, maupun dengan pengembangan sekuritas pembiayaan UMKM yang dapat memenuhi persyaratan. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk terus mendorong kredit/pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain bagi dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial OJK dan penjaminan simpanan oleh LPS terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia akan terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran pada tahun 2022 untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif. Berbagai program yang telah dicanangkan di dalam BSPI 2025 akan ditempuh sesuai jadwal dan target yang ditentukan.

Kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2022 tetap diarahkan pada lima fokus strategi pokok. *Pertama*, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran agar sehat, kompetitif, dan inovatif melalui reformasi regulasi sesuai kebijakan dan pengaturan yang lebih ramah industri dalam PBI Sistem Pembayaran, kemudahan perizinan dan persetujuan dengan *service level agreement* (SLA) antara Bank Indonesia dengan industri sistem pembayaran, serta penguatan pengawasan sistem pembayaran khususnya dalam kepatuhan permodalan, manajemen risiko, dan keamanan siber.

Kedua, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang 3I (*interoperable, interconnected, dan integrated*), aman, dan andal terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM dan transaksi ritel. Perluasan penggunaan QRIS terus ditingkatkan sebagai alat pembayaran nirsentuh dengan yang memenuhi protokol kesehatan melalui program SIAP QRIS di Pasar/Pusat Belanja, termasuk dengan peningkatan fitur-fitur layanan untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat. Perluasan penggunaan QRIS dilakukan untuk meningkatkan jumlah transaksi serta untuk mencapai target 15 juta pengguna QRIS pada tahun 2022. Implementasi SNAP untuk koneksi layanan transaksi pembayaran oleh perbankan dengan *fintech* terus dipercepat sehingga memperluas integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Demikian pula, operasionalisasi, perluasan kepesertaan, dan akseptasi pemanfaatan BI-FAST terus ditingkatkan untuk transaksi antarbank dan masyarakat yang lebih efisien dan diharapkan seluruh bank telah tersambung sebagai peserta dan mampu memberikan layanan pembayaran ritel secara serta merata (*real time*) dan tanpa henti (24/7). Selain ketiga program unggulan tersebut, yaitu QRIS, SNAP, dan BI-FAST, Bank Indonesia juga akan memperkuat reformasi sistem pembayaran digital dengan program pengembangan untuk optimalisasi data serta menjaga ketersediaan dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Ketiga, praktik pasar yang aman, efisien dan wajar untuk semakin mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terus dikembangkan. *Keempat*, persiapan penerbitan Digital Rupiah dan juga implementasi digitalisasi pengelolaan uang Rupiah akan dipercepat. Bank Indonesia juga

akan mempercepat persiapan penerbitan Digital Rupiah. *Kelima*, di sisi sistem pembayaran tunai, arah kebijakan Bank Indonesia akan difokuskan untuk menyediakan uang Rupiah yang berkualitas dan kecukupan kas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI sesuai BPPUR 2025. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan asosiasi baik sistem pembayaran, *fintech* dan *e-commerce*.

Kebijakan pendalaman pasar keuangan pada tahun 2022 dipercepat untuk penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan perekonomian nasional. Akselerasi pendalaman pasar uang pada tahun 2022 terus diarahkan untuk membangun pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta menopang transformasi pengelolaan moneter yang lebih mendukung pengembangan pasar, baik dalam instrumen (*product*), pelaku (*participant*), mekanisme penentuan harga (*pricing*), serta infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antara pasar uang dan sistem pembayaran. Pengembangan inisiatif utama BPPU 2025 dilanjutkan berdasarkan 3 (tiga) pilar kebijakan. Pada pilar *pertama*, pengembangan infrastruktur pasar uang akan difokuskan pada implementasi *central counterparty* (CCP) yang diharapkan siap beroperasi pada 2022, di samping perluasan transaksi pasar uang melalui ETP *multi-matching* baik untuk pasar uang Rupiah dan valas. Di samping itu, Bank Indonesia juga akan melakukan finalisasi *Conceptual Design* (CD) pengembangan infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, termasuk BI-APS, BI-SSSS, BI-RTGS Gen 3, dan *Trade Repository*. Pada pilar *kedua*, penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter akan difokuskan pada implementasi instrumen pasar uang yang ditransaksikan via ETP *multi-matching*, serta pengembangan transaksi Repo, DNDF, dan LCS. Sementara pada pilar *ketiga*, pembiayaan ekonomi juga akan terus diperkuat melalui 3 (tiga) strategi kebijakan yaitu (i) mendorong pengembangan sekuritisasi aset melalui program Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset berbentuk Sistem Pembayaran (EBA-SP), (ii) mendorong pengembangan investor ritel dan

literasi keuangan secara rutin, dan (iii) memperkuat koordinasi dan komunikasi terkait program *Sustainable Green Finance* (SGF).

Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Korporatisasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi. Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara *end to end* dan akan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Peningkatan akses pasar UMKM akan terus dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi dan kurasi produk, serta mendorong interkoneksi dengan *local value chain* (LVC) maupun *global value chain* (GVC), termasuk penguatan fasilitasi promosi perdagangan internasional. Sementara itu, peran ekonomi dan keuangan syariah akan terus didorong sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. Akselerasi implementasi ekosistem *halal value chain*, baik lokal maupun global, semakin diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung. Fokus pengembangan ekosistem *halal value chain* ini akan tetap diutamakan sektor unggulan makanan halal (*halal food*) dan fesyen muslim (*modest fashion*). Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui pengembangan instrumen transaksi valas dan Sukuk BI Inklusif. Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

Penguatan kebijakan keuangan hijau dilanjutkan untuk mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan hijau. Dalam rangka menjawab tantangan perubahan iklim ke depan yang dapat mengancam stabilitas perekonomian serta sebagai bentuk kontribusi aktif Bank Indonesia dalam pencapaian target Indonesia rendah karbon, Bank Indonesia akan melakukan transformasi yang bersifat

menyeluruh melalui penguatan kebijakan keuangan hijau. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan transformasi kelembagaan Bank Indonesia, termasuk terkait tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta *performance indicator* hijau. Dalam pengembangan dan implementasinya, Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi yang erat dengan KSSK, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholders* terkait.

Di sisi kebijakan internasional, Bank Indonesia juga akan terus aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 akan dioptimalkan dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia maupun perekonomian global baik melalui formulasi substansi dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya berhenti pada Presidensi G20, formulasi substansi yang mendukung kepentingan Indonesia dan kawasan akan menjadi fokus dalam keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Penguatan kerja sama internasional juga terus dilakukan pada tataran multilateral, regional, dan bilateral. Bank Indonesia juga terus ikut memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan *Investor Relation Unit* (IRU) baik di tataran daerah, nasional, dan internasional, serta akan melakukan kampanye untuk mendorong dan memperluas penggunaan LCS.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju. Pemulihan perekonomian

global yang berlanjut akan mendorong aktivitas perdagangan dunia sehingga mendorong tetap kuatnya kinerja ekspor Indonesia, baik melalui penguatan kerja sama dengan negara mitra dagang utama maupun diversifikasi ekspor pada mitra dagang yang lebih luas. Selain dukungan kinerja ekspor tersebut, prospek ekonomi domestik akan meningkat, juga didorong oleh kenaikan investasi dan produktivitas seiring dengan implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri serta daya saing perekonomian mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih berdaya tahan dengan struktur perekonomian yang makin baik. Iklim bisnis yang lebih baik sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja akan makin mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0-5,8% pada 2026. Inflasi diperkirakan tetap terjaga pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Defisit transaksi berjalan diperkirakan juga tetap terkendali pada level yang sehat dalam kisaran 1,2-2,0% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Kunci Penguatan Prospek: Transformasi Kebijakan serta Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital

Bank Indonesia berpandangan bahwa kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat guna mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Rangkaian kebijakan reformasi struktural penting untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, dengan stabilitas yang terjaga. Kebijakan reformasi struktural semakin diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang memprioritaskan pemulihan serta peningkatan produktivitas, *human capital*, dan investasi di kegiatan

ekonomi yang terdampak negatif oleh pandemi. Kebijakan reformasi struktural meliputi penyediaan infrastruktur pendukung untuk mendorong proses pemulihan ketenagakerjaan yang resilien dan inklusif, memperlancar transisi tenaga kerja, serta peningkatan *human capital* termasuk melalui kebijakan di bidang pendidikan. Perbaikan konektivitas digital perlu dilakukan untuk mendorong transformasi digital, serta mendukung peningkatan produktivitas dan output potensial. Kebijakan pengembangan rantai pasokan domestik juga perlu diakselerasi untuk memperkuat

struktur perekonomian. Selain itu, proses pemulihan di tengah masih berlanjutnya pandemi merupakan kesempatan untuk mengadopsi strategi pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk strategi mengoptimalkan peranan investasi swasta dalam mendukung ekonomi hijau ke depan.

Transformasi struktural tersebut perlu dibarengi dengan transformasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sangat diperlukan dan relevan untuk merespons dinamika perekonomian yang semakin kompleks dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju. Bank Indonesia melakukan penajaman arah strategis melalui rangkaian transformasi bauran kebijakan utama dan pendukung, termasuk penguatan kerangka operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan. Bank Indonesia melakukan transformasi dan harmonisasi kerangka kebijakan utama di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Hal tersebut ditempuh dengan mengintegrasikan kerangka kerja Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, yang ditopang oleh kebijakan pendukung. Transformasi kebijakan di tataran operasional dilakukan melalui transformasi pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan dan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia juga mendorong transformasi digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, rangkaian transformasi tersebut merupakan perwujudan upaya mencapai visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral

digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara EMs untuk Indonesia Maju.

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Dalam kaitan ini serta memasuki era peradaban baru digitalisasi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia bergerak cepat secara menyeluruh untuk melakukan akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien. Sebagai bagian implementasi BSPI 2025, berbagai capaian penting pada tahun 2021 telah dilakukan pada aspek reformasi regulasi, infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standardisasi sistem pembayaran. Langkah tersebut sebagai bagian dari paket kebijakan reformasi sistem pembayaran nasional untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, melalui pembentukan industri yang sehat dan kompetitif, infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi, interoperabilitas, aman, dan andal, serta pengembangan dan perluasan standar nasional sistem pembayaran QRIS dan SNAP. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 akan terus diperkuat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat. Selain itu, penguatan UMKM melalui transformasi digital yang menyeluruh dan inklusif dilakukan di sepanjang rantai nilai untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi. Melalui adaptasi perubahan digital tersebut, optimalisasi peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi akan terus diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

